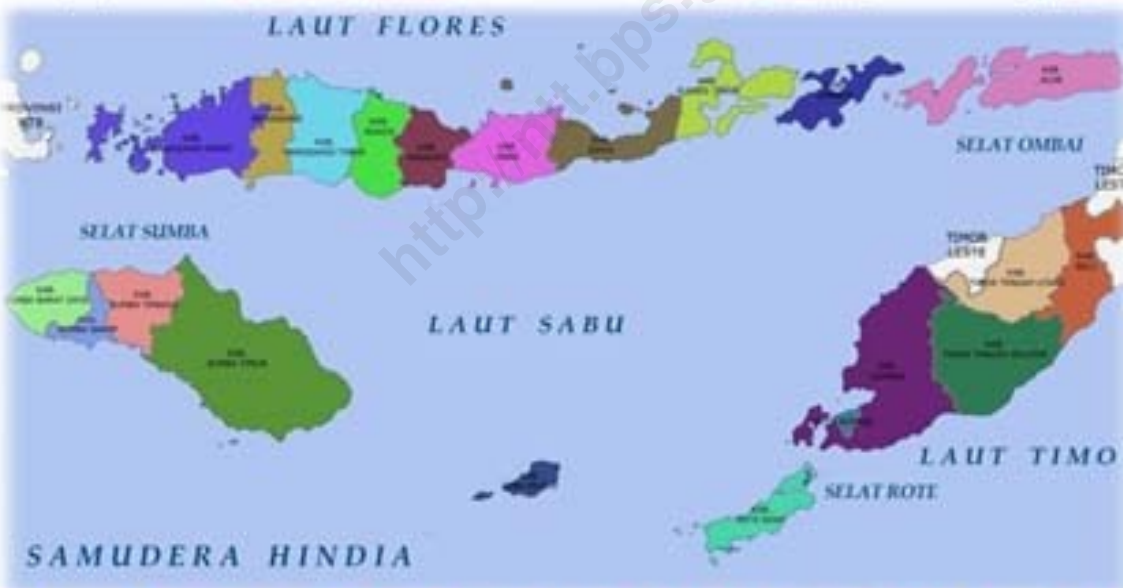


# POTENSI DESA NUSA TENGGARA TIMUR 2014



**BPS PROVINSI NTT**



## Kata Pengantar

Booklet Potensi Desa Nusa Tenggara Timur 2014 merupakan merupakan publikasi hasil pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan pada bulan April 2014 . Booklet ini dirancang untuk menyajikan informasi strategis terkait potensi desa secara ringkas namun mencakup bidang yang cukup luas.

Informasi yang disajikan mencakup perkembangan jumlah wilayah administrasi pemerintahan, ketersediaan infrastruktur sekolah dan kesehatan serta ketersediaan listrik, angkutan umum dan pasar. Publikasi ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data statistik para pengguna data.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi diberikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam seluruh rangkaian kegiatan Podes 2014 ini. Dukungan moril dan saran untuk perbaikan di masa mendatang kami harapkan.

Kupang, Mei 2015

BPS Provinsi NTT

### Potensi Desa Nusa Tenggara Timur 2014

**No. Publikasi** : 53523.1504

**Katalog BPS** : 1105015.53

**Diterbitkan oleh** : Badan Pusat Statistik, Provinsi NTT

**Naskah :**

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi NTT

**Penyunting :**

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi NTT

**Gambar Kulit :**

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi NTT

**Dicetak oleh :**

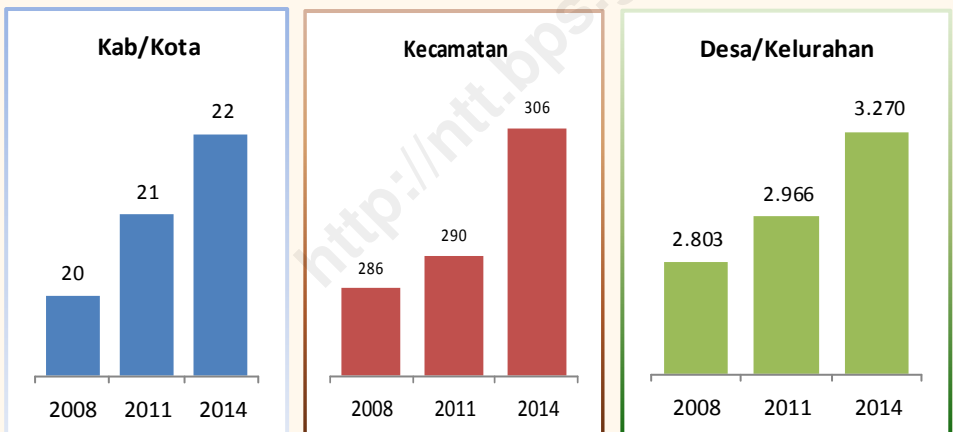
BPS Provinsi NTT

Kupang: Badan Pusat Statistik, 2014

i + 17 halaman: 13,5 cm x 26 cm

**P**endataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Sejak saat itu Podes dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 kali dalam 10 tahun. Tujuan utama Podes adalah menyediakan data tentang keberadaan, ketersediaan, dan perkembangan potensi yang dimiliki setiap wilayah administrasi pemerintahan. Potensi tersebut meliputi: sarana dan prasarana wilayah serta potensi ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan masyarakat lainnya. Pendataan Podes 2014 dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) di Indonesia. Informasi terkait Potensi Desa dikumpulkan melalui wawancara dan penelaahan dokumen di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.

**Perkembangan Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, NTT 2008 - 2014**



**S**ejak diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah, jumlah wilayah administrasi pemerintahan di NTT mengalami peningkatan yang cukup bermakna. Dalam kurun tahun 2011 - 2014, data Podes mencatat sebanyak 2.966 desa/kelurahan mengalami perubahan menjadi 3.270 desa/kelurahan. Perubahan tersebut mencakup pemekaran atau penggabungan dengan wilayah lain yang terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota.

- Wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa yang didata harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: 1) mempunyai wilayah, 2) mempunyai penduduk yang menetap di wilayah tersebut, dan 3) mempunyai pemerintahan.
- Dalam booklet ini yang disebut sebagai desa meliputi: Desa, Nagari, UPT/SPT yang masih dibina oleh kementerian terkait.

## Jumlah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/ Kota, 2014

Nomor	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Kab. Sumba Barat	6	74
2	Kab. Sumba Timur	22	156
3	Kab. Kupang	24	177
4	Kab. Timor Tengah Selatan	32	278
5	Kab. Timor Tengah Utara	24	193
6	Kab. Belu	12	81
7	Kab. Alor	17	175
8	Kab. Lembata	9	151
9	Kab. Flores Timur	19	250
10	Kab. Sikka	21	160
11	Kab. Ende	21	278
12	Kab. Ngada	12	151
13	Kab. Manggarai	11	162
14	Kab. Rote Ndao	10	89
15	Kab. Manggarai Barat	10	169
16	Kab. Sumba Tengah	5	65
17	Kab. Sumba Barat Daya	11	131
18	Kab. Nagekeo	7	113
19	Kab. Manggarai Timur	9	176
20	Kab. Sabu Raijua	6	63
21	Kab. Malaka	12	127
22	Kota Kupang	6	51
<b>Nusa Tenggara Timur</b>		<b>306</b>	<b>3.270</b>

- UPT adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat.
- SPT adalah satuan permukiman potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

## Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Setingkat Desa, 2014

No	Kabupaten/Kota	Desa	Kelurahan	UPT/SPT	Jumlah
1	Kab. Sumba Barat	63	11	0	74
2	Kab. Sumba Timur	140	16	0	156
3	Kab. Kupang	160	17	0	177
4	Kab. Timor Tengah Selatan	266	12	0	278
5	Kab. Timor Tengah Utara	160	33	0	193
6	Kab. Belu	69	12	0	81
7	Kab. Alor	158	17	0	175
8	Kab. Lembata	144	7	0	151
9	Kab. Flores Timur	229	21	0	250
10	Kab. Sikka	147	13	0	160
11	Kab. Ende	255	23	0	278
12	Kab. Ngada	135	16	0	151
13	Kab. Manggarai	145	17	0	162
14	Kab. Rote Ndao	82	7	0	89
15	Kab. Manggarai Barat	164	5	0	169
16	Kab. Sumba Tengah	65	0	0	65
17	Kab. Sumba Barat Daya	129	2	0	131
18	Kab. Nagekeo	97	16	0	113
19	Kab. Manggarai Timur	158	18	0	176
20	Kab. Sabu Raijua	58	5	0	63
21	Kab. Malaka	127	0	0	127
22	Kota Kupang	0	51	0	51
<b>Nusa Tenggara Timur</b>		<b>2.951</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>3.270</b>

<sup>1</sup> Tidak termasuk UPT/SPT

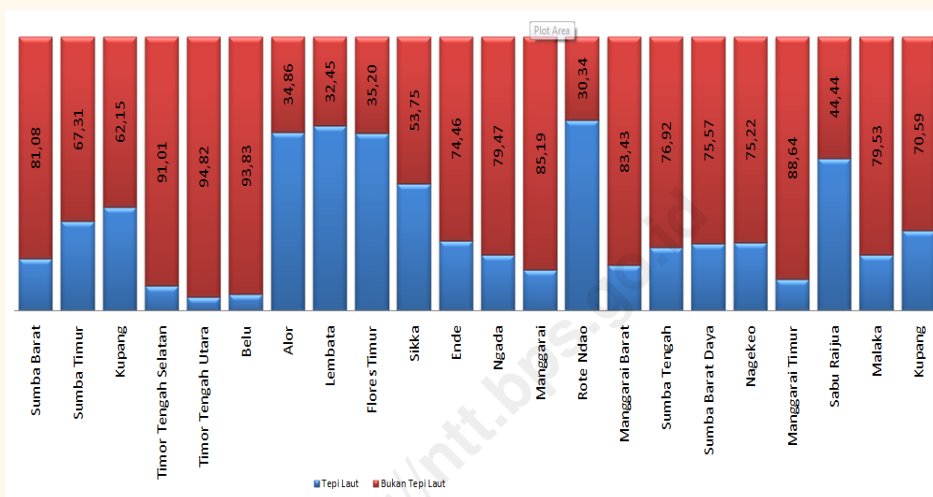
- UPT adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat.
- SPT adalah satuan permukiman potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

# 2

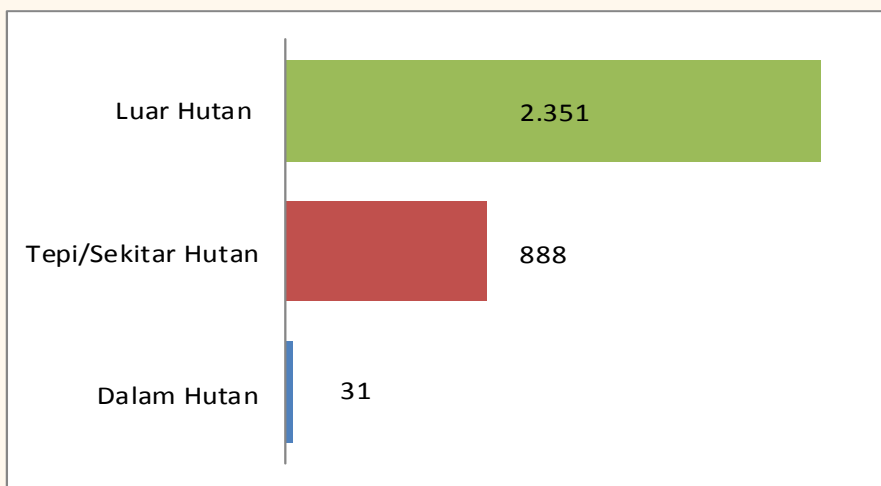
## LOKASI DESA/KELURAHAN

Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana dua pertiga luas wilayah Indonesia merupakan lautan. Selain itu, Indonesia juga dikenal memiliki wilayah hutan hujan tropis yang relatif luas. Kedua kondisi alam tersebut memberikan potensi tersendiri terhadap wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut ataupun yang berada dekat dengan hutan.

**Persentase Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Terhadap Laut, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2014**



**Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Terhadap Hutan, NTT Tahun 2014**



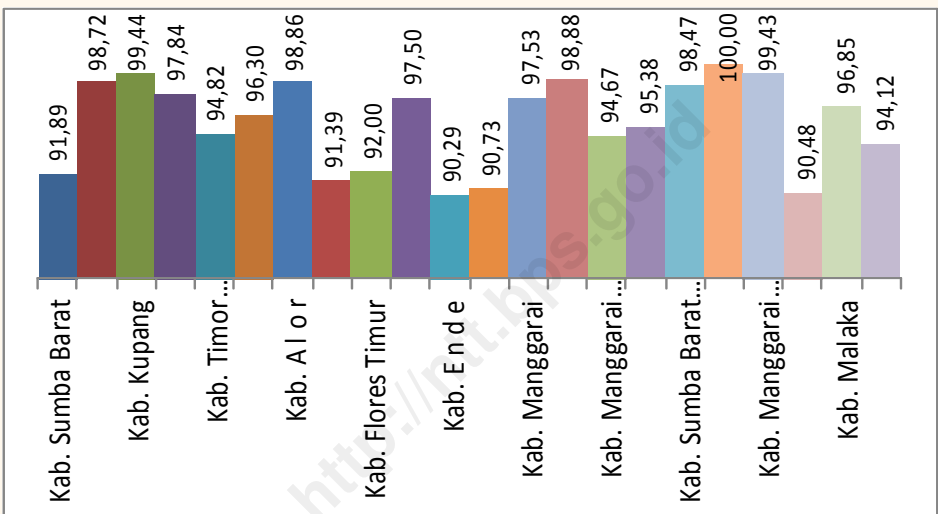
Desa/Kelurahan dikategorikan berbatasan langsung dengan laut jika ada wilayah desa/kelurahan yang bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang

## Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Terhadap Laut dan Hutan, 2014

Kabupaten/Kota	Lokasi Desa/Kelurahan Terhadap Laut		Lokasi Desa/Kelurahan Terhadap Hutan		
	Tepi Laut	Bukan Tepi Laut	Di Dalam Hutan	Sekitar Hutan	Di Luar Hutan
Kab. Sumba Barat	14	60	0	15	59
Kab. Sumba Timur	51	105	1	53	102
Kab. Kupang	67	110	1	73	103
Kab. Timor Tengah Selatan	25	253	0	57	221
Kab. Timor Tengah Utara	10	183	5	57	131
Kab. Belu	5	76	1	32	48
Kab. Alor	114	61	7	13	155
Kab. Lembata	102	49	0	37	114
Kab. Flores Timur	162	88	4	76	170
Kab. Sikka	74	86	0	37	123
Kab. Ende	71	207	5	35	238
Kab. Ngada	31	120	0	65	86
Kab. Manggarai	24	138	1	45	116
Kab. Rote Ndao	62	27	0	37	52
Kab. Manggarai Barat	28	141	4	58	107
Kab. Sumba Tengah	15	50	0	16	49
Kab. Sumba Barat Daya	32	99	1	30	100
Kab. Nagekeo	28	85	1	40	72
Kab. Manggarai Timur	20	156	0	79	97
Kab. Sabu Raijua	35	28	0	4	59
Kab. Malaka	26	101	0	28	99
Kota Kupang	15	36	0	1	50
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>1.011</b>	<b>2.259</b>	<b>31</b>	<b>888</b>	<b>2.351</b>

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Untuk itu, pemerintah telah mengatur tersedianya minimal satu SD/MI pada setiap desa/kelurahan dan minimal satu SMP/MTs pada setiap kecamatan. Pemerintah juga mengatur bahwa pada wilayah yang tidak tersedia satuan pendidikan tersebut, jarak tempuh ke sekolah terdekat maksimal adalah 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs.

**Persentase Desa/Kelurahan yang Mempunyai SD/MI Menurut Kabupaten/Kota, 2014**



Hasil Podes 2014 mencatat:

- Hampir semua desa/kelurahan sudah terjangkau oleh sarana pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD/MI). Kabupaten Nagekeo merupakan kabupaten yang mempunyai SD/MI di seluruh desa/kelurahan.
- Bila dibandingkan antar kabupaten/kota, tiga kabupaten dengan persentase desa/kelurahan yang tidak mempunyai SD/MI paling tinggi adalah Ende, Sabu Raijua, dan Ngada.

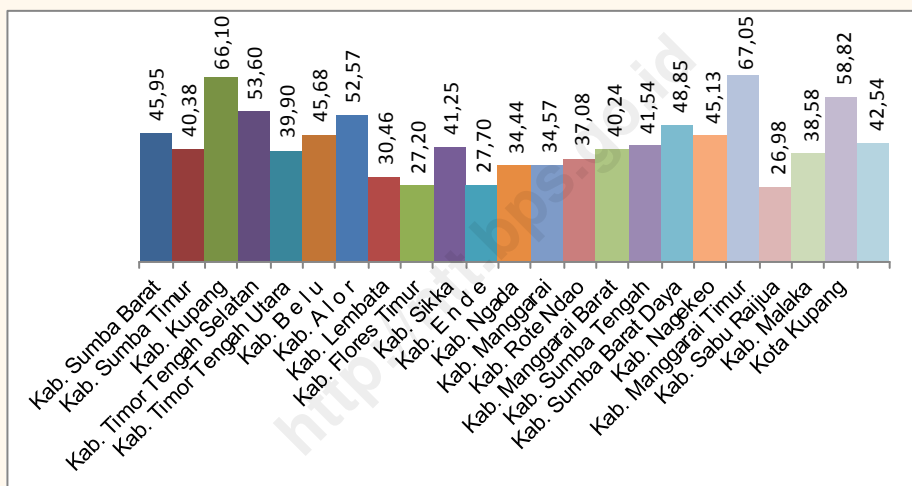


## Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan SD/MI, 2014

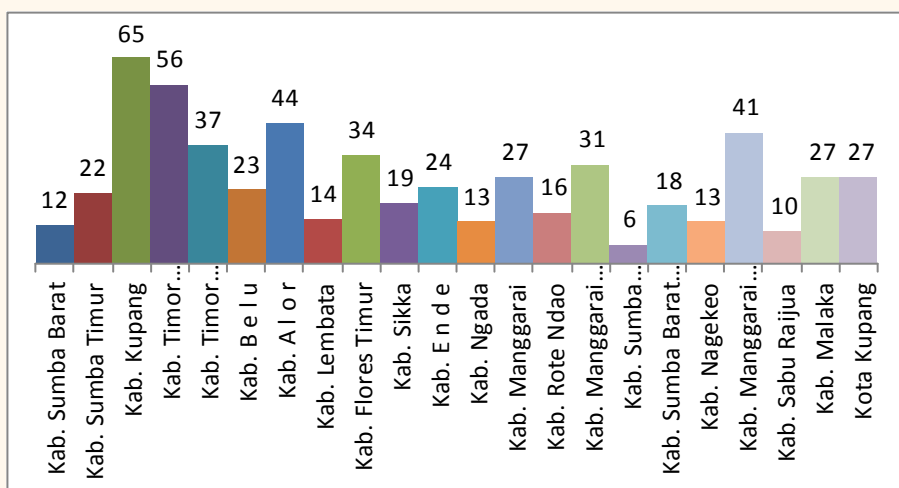
Kabupaten/Kota	Ada SD/MI	Tidak Ada SD/MI	Jumlah
Kab. Sumba Barat	68	6	74
Kab. Sumba Timur	154	2	156
Kab. Kupang	176	1	177
Kab. Timor Tengah Selatan	272	6	278
Kab. Timor Tengah Utara	183	10	193
Kab. Belu	78	3	81
Kab. Alor	173	2	175
Kab. Lembata	138	13	151
Kab. Flores Timur	230	20	250
Kab. Sikka	156	4	160
Kab. Ende	251	27	278
Kab. Ngada	137	14	151
Kab. Manggarai	158	4	162
Kab. Rote Ndao	88	1	89
Kab. Manggarai Barat	160	9	169
Kab. Sumba Tengah	62	3	65
Kab. Sumba Barat Daya	129	2	131
Kab. Nagekeo	113	0	113
Kab. Manggarai Timur	175	1	176
Kab. Sabu Raijua	57	6	63
Kab. Malaka	123	4	127
Kota Kupang	48	3	51
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>3.129</b>	<b>141</b>	<b>3.270</b>

Sarana pendidikan menengah pertama dan menengah atas masih tersedia di sebagian wilayah kecamatan di NTT. Dari 3.270 desa/kelurahan yang tercatat dalam Podes 2014, terdapat 1.391 desa/kelurahan yang mempunyai SMP/MTs dan hanya 579 desa/kelurahan yang mempunyai SMU/SMK/MA. Kabupaten Manggarai Timur merupakan kabupaten yang dengan persentase desa yang memiliki SMP/MTs tertinggi, sedangkan Kabupaten Sabu Raijua adalah terendah.

**Persentase Desa yang Mempunyai SMP/MTs  
Menurut Kabupaten/Kota, 2014**



**Jumlah Desa yang Mempunyai SMU/SMK/MA  
Menurut Kabupaten/Kota, 2014**

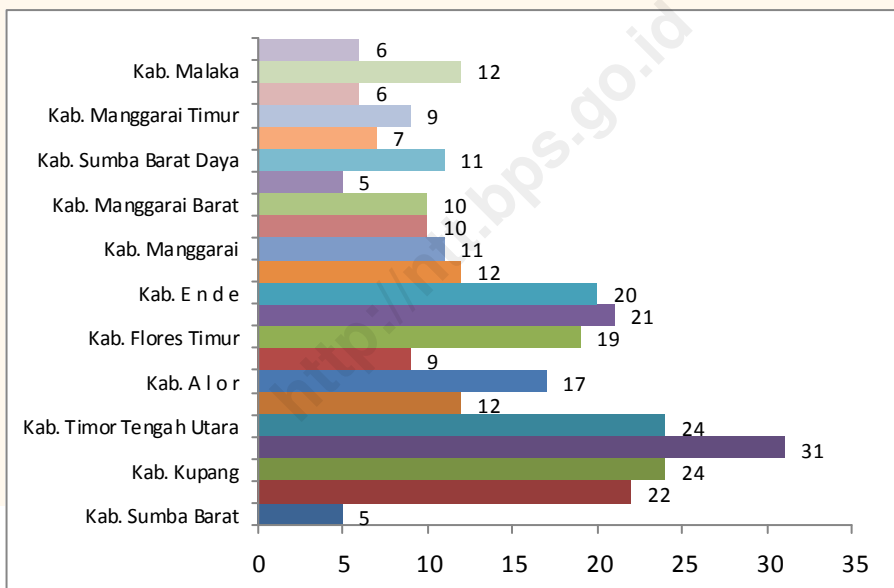


## Jumlah Desa Menurut Keberadaan SMP/MTs dan SMU/SMK/MA, 2014

Kabupaten/Kota	Keberadaan SMP/MTs		Keberadaan SMU/SMK/MA		Jumlah Desa
	Ada SMP/MTs	Tidak Ada SMP/MTs	Ada SMU/SMK/MA	Tidak Ada SMU/SMK/MA	
Kab. Sumba Barat	34	40	12	62	74
Kab. Sumba Timur	63	93	22	134	156
Kab. Kupang	117	60	65	112	177
Kab. Timor Tengah Selatan	149	129	56	222	278
Kab. Timor Tengah Utara	77	116	37	156	193
Kab. Belu	37	44	23	58	81
Kab. Alor	92	83	44	131	175
Kab. Lembata	46	105	14	137	151
Kab. Flores Timur	68	182	34	216	250
Kab. Sikka	66	94	19	141	160
Kab. Ende	77	201	24	254	278
Kab. Ngada	52	99	13	138	151
Kab. Manggarai	56	106	27	135	162
Kab. Rote Ndao	33	56	16	73	89
Kab. Manggarai Barat	68	101	31	138	169
Kab. Sumba Tengah	27	38	6	59	65
Kab. Sumba Barat Daya	64	67	18	113	131
Kab. Nagekeo	51	62	13	100	113
Kab. Manggarai Timur	118	58	41	135	176
Kab. Sabu Raijua	17	46	10	53	63
Kab. Malaka	49	78	27	100	127
Kota Kupang	30	21	27	24	51
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>1.391</b>	<b>1.879</b>	<b>579</b>	<b>2.691</b>	<b>3270</b>

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945. Untuk itu, ketersediaan rumah sakit pada setiap kabupaten/kota serta ketersediaan puskesmas yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat pada setiap kecamatan menjadi sangat penting. Dalam melaksanakan fungsi dan menjangkau wilayah kerjanya, Puskesmas mempunyai jaringan pelayanan, diantaranya adalah Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pondok Bersalin Desa (Polindes).

#### Jumlah Kecamatan yang Tidak Mempunyai Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu) Menurut Kab/Kota, 2014



Hasil Podes 2014 mencatat:

- Terdapat 38 kecamatan (12,42%) telah mempunyai rumah sakit/ rumah sakit bersalin, 303 kecamatan (99,02%) telah mempunyai Puskesmas/Pustu, dan 1.540 desa/kelurahan (47,09%) telah mempunyai Poskesdes/Polindes.

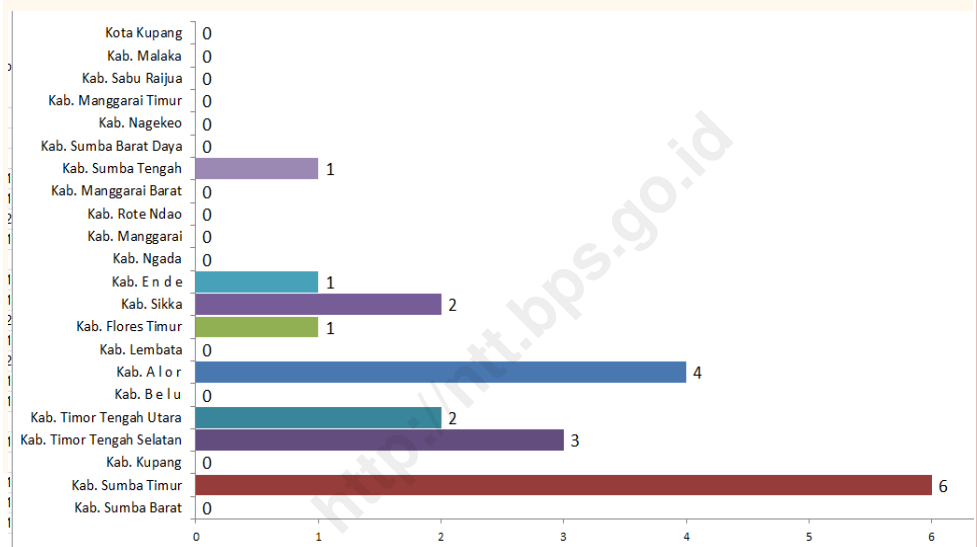
## Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan yang Memiliki Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas/Pustu dan Poskesdes/Polindes, 2014

Kabupaten/Kota	Kecamatan yang Memiliki Rumah Sakit/ Rumah Sakit Bersalin	Kecamatan yang Memiliki Puskesmas/Pustu	Desa/Kelurahan yang Memiliki Poskesdes/ Polindes
Kab. Sumba Barat	2	5	32
Kab. Sumba Timur	4	22	72
Kab. Kupang	3	24	21
Kab. Timor Tengah Selatan	1	31	104
Kab. Timor Tengah Utara	1	24	143
Kab. Belu	3	12	63
Kab. Alor	1	17	55
Kab. Lembata	1	9	89
Kab. Flores Timur	1	19	125
Kab. Sikka	4	21	139
Kab. Ende	3	20	121
Kab. Ngada	1	12	63
Kab. Manggarai	2	11	83
Kab. Rote Ndao	1	10	2
Kab. Manggarai Barat	0	10	75
Kab. Sumba Tengah	1	5	38
Kab. Sumba Barat Daya	1	11	83
Kab. Nagekeo	0	7	61
Kab. Manggarai Timur	0	9	72
Kab. Sabu Raijua	1	6	9
Kab. Malaka	1	12	88
Kota Kupang	6	6	2
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>38</b>	<b>303</b>	<b>1.540</b>

- Untuk dapat menjangkau wilayah kerjanya, puskesmas mempunyai jaringan pelayanan yang meliputi unit Pustu, unit Puskesmas Keliling, dan unit bidan desa/komunitas.
- Poskesdes merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, kebutuhan energi listrik memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Peran penting tersebut, diantaranya untuk mendukung proses industrialisasi dimana energi listrik berfungsi sebagai bahan baku produksi dan bahan bakar. Tersedianya energi listrik dalam jumlah yang mencukupi akan ikut menentukan keberhasilan pembangunan terutama di era otonomi daerah sekarang ini.

### Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Terdapat Keluarga Pengguna Listrik Menurut Kab/Kota, 2014



### Hasil Podes 2014 mencatat:

- Terdapat 8 kabupaten/kota, dimana seluruh desa/kelurahan tidak terdapat keluarga pengguna listrik yaitu kabupaten Sumba Timur (6 desa), Kab. TTS (3 desa), Kab TTU (2 desa), Kab. Alor (4 desa), Kab. Flotim (1 desa), Kab. Sikka (2 desa), Kab. Ende (1 desa), dan Kab Sumba Tengah (1 desa).
- Sebanyak 3.250 desa/kelurahan yang telah terdapat keluarga pengguna listrik, tersebar pada 22 kab/kota.

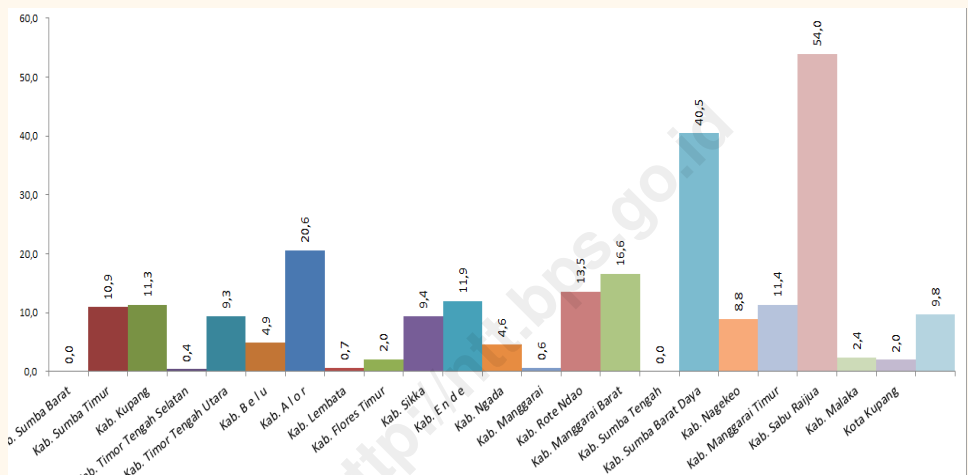
- Keluarga pengguna listrik terdiri dari keluarga pengguna listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan keluarga pengguna listrik non-PLN.
- Sumber penerangan jalan utama desa/kelurahan dapat berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah. Listrik pemerintah, jika sumber pembiayaan penerangan jalan utama desa/kelurahan berasal dari pemerintah. Listrik non-pemerintah, jika sumber pembiayaan penerangan jalan utama desa/kelurahan dari pihak swasta atau swadaya masyarakat.

## Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keluarga Pengguna Listrik dan Keberadaan Penerangan Jalan Utama di Desa/Kelurahan, 2014

Kabupaten/Kota	Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik		Keberadaan Penerangan Jalan Utama Desa		Total
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	
Kab. Sumba Barat	74	0	8	66	74
Kab. Sumba Timur	150	6	11	145	156
Kab. Kupang	177	0	13	164	177
Kab. Timor Tengah Selatan	275	3	13	265	278
Kab. Timor Tengah Utara	191	2	5	188	193
Kab. B e l u	81	0	15	66	81
Kab. A l o r	171	4	2	173	175
Kab. Lembata	151	0	25	126	151
Kab. Flores Timur	249	1	24	226	250
Kab. Sikka	158	2	29	131	160
Kab. E n d e	277	1	25	253	278
Kab. Ngada	151	0	26	125	151
Kab. Manggarai	162	0	5	157	162
Kab. Rote Ndao	89	0	9	80	89
Kab. Manggarai Barat	169	0	5	164	169
Kab. Sumba Tengah	64	1	4	61	65
Kab. Sumba Barat Daya	131	0	10	121	131
Kab. Nagekeo	113	0	12	101	113
Kab. Manggarai Timur	176	0	0	176	176
Kab. Sabu Raijua	63	0	2	61	63
Kab. Malaka	127	0	6	121	127
Kota Kupang	51	0	49	2	51
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>3.250</b>	<b>20</b>	<b>298</b>	<b>2972</b>	<b>3270</b>

Angkutan umum merupakan sarana transportasi yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Ketersediaan angkutan umum akan meningkatkan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya. Hal ini akan menghilangkan keterisolasian daerah dan memberi stimulan ke arah kemajuan pembangunan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan.

### Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Angkutan Umum Menurut Kabupaten/Kota, 2014



Hasil Podes 2014, mencatat:

- Masih terdapat 319 desa/kelurahan yang tidak ada angkutan umum yang melewati desa/kelurahan.
- Bila dibandingkan antar kabupaten, maka Sabu Raijua, Sumba Barat Daya dan Alor merupakan tiga kabupaten dengan persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki angkutan umum yang paling tinggi.
- Sumba Timur dan Sumba Tengah merupakan Kabupaten yang semua wilayah kelurahannya sudah dilewati angkutan umum.

Angkutan umum bertrayek adalah angkutan orang, barang, dan atau orang dan barang yang mempunyai asal, tujuan dan lintasan perjalanan dengan trayek tertentu, tidak termasuk angkutan khusus barang.

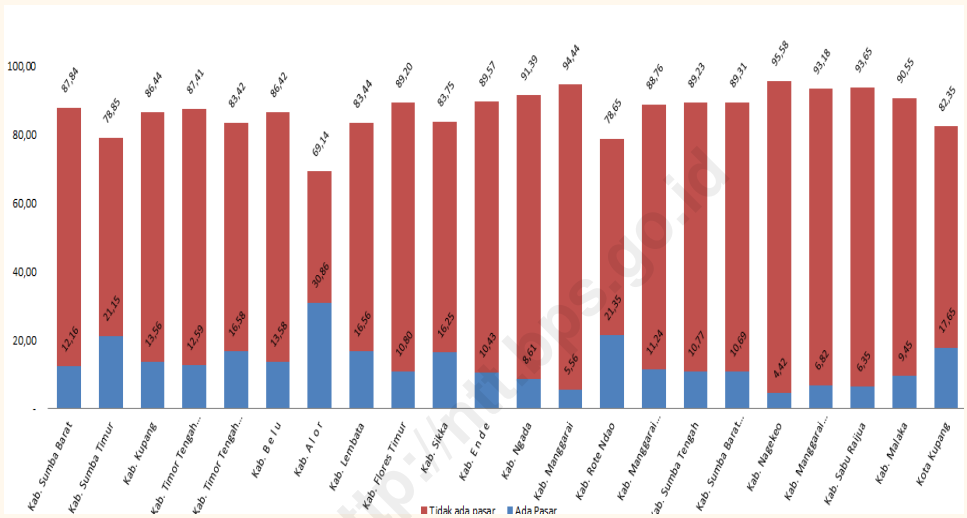


**Jumlah Desa/Kelurahan Menurut  
Keberadaan Angkutan Umum yang Melewati  
Desa/Kelurahan, 2014**

Kabupaten/Kota	Ada Angkutan Umum		Tidak Ada Angkutan Umum	Total
	Trayek Tetap	Trayek Tidak Tetap		
Kab. Sumba Barat	47	27	0	74
Kab. Sumba Timur	105	34	17	156
Kab. Kupang	82	75	20	177
Kab. Timor Tengah Selatan	129	148	1	278
Kab. Timor Tengah Utara	121	54	18	193
Kab. Belu	48	29	4	81
Kab. Alor	63	76	36	175
Kab. Lembata	116	34	1	151
Kab. Flores Timur	156	89	5	250
Kab. Sikka	122	23	15	160
Kab. Ende	159	86	33	278
Kab. Ngada	104	40	7	151
Kab. Manggarai	134	27	1	162
Kab. Rote Ndao	8	69	12	89
Kab. Manggarai Barat	100	41	28	169
Kab. Sumba Tengah	13	52	0	65
Kab. Sumba Barat Daya	43	35	53	131
Kab. Nagekeo	53	50	10	113
Kab. Manggarai Timur	91	65	20	176
Kab. Sabu Raijua	0	29	34	63
Kab. Malaka	48	76	3	127
Kota Kupang	41	9	1	51
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>1.783</b>	<b>1.168</b>	<b>319</b>	<b>3.270</b>

Tersedianya sarana perdagangan seperti pasar dapat menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu wilayah. Di sini terjadi transaksi ekonomi antara pembeli dan penjual. Selain sebagai pusat kegiatan ekonomi yang mendorong dan memperlancar kegiatan yang bersifat ekonomi bagi masyarakat, pasar juga mampu memberikan peran yang maksimal terhadap penciptaan lapangan kerja.

**Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Pasar Menurut Kabupaten/Kota, 2014**



Hasil Podes 2014 mencatat:

- Sebanyak 428 desa/kelurahan yang hanya mempunyai pasar dengan bangunan dan 241 desa/kelurahan yang hanya mempunyai pasar tanpa bangunan.
- Sebanyak 428 desa/kelurahan mempunyai dua jenis pasar, baik pasar dengan bangunan maupun tanpa bangunan.
- Masih terdapat 2.842 desa/kelurahan yang tidak mempunyai pasar, baik pasar dengan bangunan maupun pasar tanpa bangunan.

Pasar mencakup pasar dengan bangunan dan pasar tanpa bangunan. Pasar dengan bangunan adalah pasar pada bangunan tetap, yang memiliki lantai, atap, dan dinding baik permanen maupun tidak permanen. Pasar tanpa bangunan adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan termasuk pasar terapung, pasar subuh.

## Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pasar, 2014

Kabupaten/Kota	Ada Pasar			Tidak Ada Pasar	Total
	Hanya Pasar dengan Bangunan	Hanya Pasar tanpa Bangunan	Pasar dengan Bangunan dan tanpa Bangunan		
Kab. Sumba Barat	9	0	9	65	74
Kab. Sumba Timur	33	20	33	123	156
Kab. Kupang	24	15	24	153	177
Kab. Timor Tengah Selatan	35	46	35	243	278
Kab. Timor Tengah Utara	32	9	32	161	193
Kab. Belu	11	7	11	70	81
Kab. Alor	54	13	54	121	175
Kab. Lembata	25	8	25	126	151
Kab. Flores Timur	27	11	27	223	250
Kab. Sikka	26	3	26	134	160
Kab. Ende	29	14	29	249	278
Kab. Ngada	13	1	13	138	151
Kab. Manggarai	9	4	9	153	162
Kab. Rote Ndao	19	9	19	70	89
Kab. Manggarai Barat	19	6	19	150	169
Kab. Sumba Tengah	7	3	7	58	65
Kab. Sumba Barat Daya	14	11	14	117	131
Kab. Nagekeo	5	9	5	108	113
Kab. Manggarai Timur	12	5	12	164	176
Kab. Sabu Raijua	4	15	4	59	63
Kab. Malaka	12	24	12	115	127
Kota Kupang	9	8	9	42	51
<b>NTT</b>	<b>428</b>	<b>241</b>	<b>428</b>	<b>2.842</b>	<b>3.270</b>

# DATA

**MENCERDASKAN BANGSA**



**Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur**  
Jl. R. Soeprpto No. 5 Kupang 85111  
Telp.: (0380) 826289, 821755, Fax: (0380) 833124  
E-mail: [bps5300@bps.go.id](mailto:bps5300@bps.go.id)